

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki predikat sebagai daerah pariwisata yang terkenal di Indonesia. Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar, budaya, dan perjuangan. Menurut BPS DIY Kota Yogyakarta memiliki wisata yang sangat bervariasi seperti dataran rendah yakni pantai juga dataran tinggi seperti gunung Merapi, selain itu Yogyakarta juga memiliki wisata budaya dan sejarah seperti Malioboro yang menjadi ikon Kota Yogyakarta.

Selain itu Yogyakarta juga memiliki wisata budaya dan sejarah seperti Malioboro yang menjadi ikon Kota Yogyakarta, Malioboro terkenal akan pusat perbelanjaan seperti khas oleh-oleh Kota Yogyakarta, banyak wisatawan lokal dan turis mengunjungi Malioboro untuk berbelanja atau sekedar menikmati suasana keramaian Malioboro, terkenalnya Malioboro menjadi titik tumbuh pendapatan perekonomian baru bagi Masyarakat di Yogyakarta, majunya pariwisata di Yogyakarta tidak lepas dari peran pemerintah dalam mempromosikan pariwisata melalui media sosial untuk meningkatkan kunjungan wisata (Prastiyanti & Yulianto, 2019)

Tetapi hal tersebut menjadi kesenjangan terhadap daerah lain di Yogyakarta, masih banyak usaha kecil yang belum bisa bersaing atau sekedar berlanjut karena ketatnya persaingan pasar lokal. Hal ini juga memberi dampak positif kepada

masyarakat Yogyakarta karena adanya peluang wirausaha untuk meningkatkan ekonomi pedapatan di dukung dengan sektor geografi yang sangat ideal.

Indonesia sebagai negara yang berkembang di artikan sebagai negara yang di hadapkan oleh kemiskinan. dan kebanyakan Masyarakat di negara berkembang memiliki penghasilan yang rendah mempengaruhi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kesehatan. Lemahnya fundamental ekonomi Indonesia sekarang, pemerintah di harapkan dapat memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) (Wulan et al., n.d.). Permasalahan yang di hadapin para usaha mikro yakni kurang nya dukungan pemerintah serta lemah nya sumber daya manusia yang rendah dan minim nya pengetahuan mengenai wirausaha (Siska Karunia et al., 2020).

Pada era globalisasi saat ini mencari pekerjaan sangatlah sulit. Perusahaan memiliki standard yang cukup tinggi untuk kriteria dalam mencari tenaga kerja. Pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan sangat dibutuhkan untuk mencari pekerjaan pada era saat ini. Perusahaan membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas untuk perkembangan perusahaannya dalam bersaing didunia bisnis. Persaingan pendaftar tenaga kerja yang cukup ketat dan keterbatasanya lapangan kerja, menjadikan ketimpangan dan muncul lah pengangguran.

Masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan disebabkan oleh keterbatasan dalam pendidikan, keterampilan, dan pengetahuan. Menurut (Rahmawati & Kisworo, 2020) keterbatasan tersebut dapat menyebabkan masalah perekonomian sendiri di lingkungan masyarakat. Berdasarkan fenomena tersebut pemerintah

memberikan perhatiannya kepada masyarakat yang memiliki masalah dalam ekonomi.

Kelompok usaha Bersama (KUBE) adalah program yang dikeluarkan pemerintah yakni kementerian sosial republik Indonesia hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat miskin yang ada di Indonesia yang butuh perhatian pada pemerintah selaras dengan dibentuknya Kelompok Usaha Bersama (KUBE) ini bertujuan untuk pemberdayaan sosial dan penanggulangan kelompok miskin atau rentan dengan melakukan pemberian modal usaha yang diharapkan menciptakan kemandirian ekonomi terhadap pendapatan masyarakat rentan untuk mengelola usaha ekonomi produktif (UEP), Pemerintah memiliki program bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Kelompok Usaha Bersama (KUBE) merupakan cara pendekatan pemerintahan kepada masyarakat dengan memberikan dukungan dari ketidak mampuannya (Melinawati, 2020)

Proses lahirnya KUBE dimulai dengan terbentuknya kelompok yang merupakan hasil dari penyuluhan sosial, pelatihan keterampilan usaha, rangsangan bantuan, dan shelter. Salah satu upaya Kementerian Sosial untuk membantu dalam kesejahteraan masyarakat untuk keluarga kurang mampu meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan produktif secara ekonomi dan pembentukan keuangan mikro adalah program KUBE.

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu negara. Pendekatan ini dapat mewujudkan masyarakat yang adil, demokrasi, sejahterah, dan maju. Masyarakat

perlu adanya peran pemerintah yang nyata agar dapat membawa masyarakat dari ketidak mampuan masyarakat. Hal ini diterapkan dalam sistem perekonomian masyarakat melalui Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

UMKM merupakan kegiatan usaha yang tidak membutuhkan modal yang besar dan dapat dilakukan oleh siapapun. Saat ini sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang berkembang pesat khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Peningkatan jumlah UMKM pada Daerah Istimewa Yogyakarta setiap tahunnya terus meningkat berdasarkan data yang di dapat oleh Bappeda Diy, t.t. pada tahun 2019 UKM tercatat 262.130 pada tahun 2020 tercatat ada 287.682,00-unit UKM pada tahun 2021 tercatat 329.719,00-unit pada tahun 2022 tercatat 342,921.00-unit pada 2023 tercatat 344.293,00 unit.

Perkembangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah, karena UMKM sangat memberikan pengaruh terhadap perekonomian negara. Pada sistem ekonomi yang sehat, masyarakat akan lebih mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain kemandirian, program ini akan memberikan perubahan dalam kemampuan atau keterampilan masyarakat dalam mengelola usaha yang didirikan. Masyarakat lebih paham bagaimana berjalannya suatu usaha tersebut, dan mengelola secara benar. Menurut (Fitria & Fachrurozi, 2023) faktor keberhasilan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah bantuan modal, pengalaman berwirausaha, dan peran pendampingan.

Bantuan modal dan pengalaman yang diberikan oleh pemerintah agar Masyarakat miskin atau rentan dapat memulai usaha UMKM yang sudah difasilitasi

untuk dilakukan secara berkelompok atau di sebut dengan KUBE untuk menambah modal dan pengalaman penerima bantuan untuk menjadi lebih terarah dan sejahtera. dalam kemandirian mengentaskan permasalahan lingkungan harus segera di selesaikan secara bersama, karena itu pemerintah membuat program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 kabupaten dan 1 kota yang terdiri dari kota Yogyakarta, Bantul, Gunungkidul, Sleman, Kulon Progo. Tingkat kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020, 2021, 2022 mengalami kenaikan dan penurunan angka kemiskinan, pada tahun 2020 Kota Yogyakarta menunjukkan angka 31,62 ribu masyarakat miskin, Kabupaten Bantul memiliki jumlah 138,66 ribu masyarakat miskin pada Kabupaten Gunung Kidul memiliki angka 126,61 ribu masyarakat miskin pada Provinsi Sleman memiliki angka 99,78 ribu masyarakat miskin pada Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2020 memiliki angka 78,06 ribu masyarakat miskin. Pada tahun 2020 total angka kemiskinan mencapai 455,72 ribu masyarakat miskin yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada tahun 2021 angka kemiskinan mengalami kenaikan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di karenakan efek pandemi covid-19 pada Kabupaten Bantul angka kemiskinan 146,98 ribu, masyarakat miskin pada Kabupaten Gunung Kidul memiliki 135,33 ribu, masyarakat miskin pada Kabupaten Sleman memiliki 108,93 ribu, masyarakat miskin pada Kabupaten Kulomprogo memiliki 81,14 ribu, masyarakat miskin dan Kota Yogyakarta memiliki 34,07 ribu, masyarakat miskin

jika di totalkan angka kemiskinan pada tahun 2021 yakni 506,45 ribu, Masyarakat miskin yang artinya ada peningkatan pada tahun 2020.

Pada tahun 2022 Kabupaten Bantul memiliki 130,13 ribu, masyarakat miskin pada Kabupaten Gunungkidul memiliki 122,82 ribu masyarakat miskin pada Kabupaten Sleman memiliki 98,92 ribu, masyarakat miskin pada Kabupaten Kulon progo memiliki 73,21 ribu masyarakat miskin dan pada Kota Yogyakarta memiliki 29,68 ribu masyarakat miskin pada tahun 2022 total Masyarakat miskin di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki angka 254,76 ribu pada angka tersebut bisa di jelaskan bahwa tahun 2022 merupakan berkurangnya masyarakat miskin pada tahun sebelumnya, meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukan angka positive hal ini tidak bisa di anggap sebelah mata karena angka 454,76 ribu masyarakat masih perlu perhatian lebih dari pemerintah, pada data yang di dapatkan merupakan hasil data dari Badan Pusat Statistik Yogyakarta pada tahun 2020 2021 dan 2022 . Berikut data table yang di sampaikan:

Tabel 1. 1 Data Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

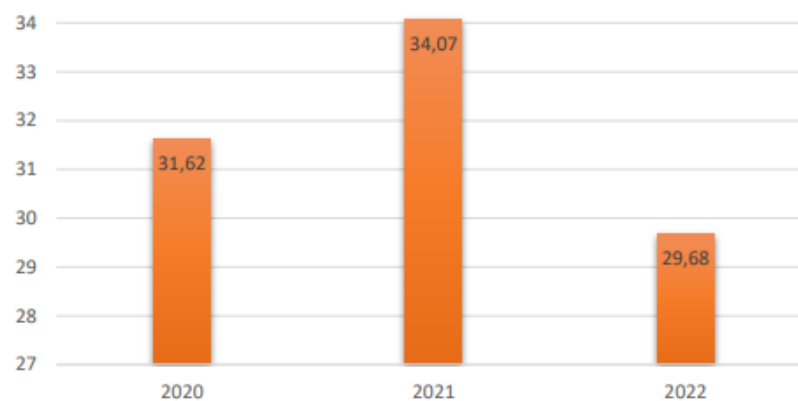
Kabupaten/kota	Jumlah Penduduk miskin menurut kabupaten/kota (Ribuan)		
	2020	2021	2023
D.I Yogyakarta	457,72	506,45	454,76
Bantul	138,66	146,98	130,13
Gunung kidul	127,61	135,33	122,13
Sleman	99,78	108,93	98,92
Kulon progo	78,06	81,14	73,21
Yogyakarya	31,62	34,07	29,68

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Berdasarkan fenomena tersebut, kemiskinan di Yogyakarta memiliki presentase kemiskinan yang beragam hal selaras yang di jelaskan oleh Badan Pusat

Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi termiskin nomor satu di Pulau Jawa dengan angka 11,49%, oleh karena itu pentingnya pemberdayaan masyarakat untuk membantu merubah kehidupan yang lebih terarah juga penting dalam kestabilan ekonomi di daerah dalam menunjang keberlanjutan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, karena itu KUBE diharapkan dapat berjalan dengan optimal dalam untuk masyarakat yang rentan dapat hidup dengan layak dan terarah.

Gambar 1. 1 Data Kemiskinan Kota Yogyakarta tahun 2020- 2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Dari lima kabupaten yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, wilayah Kota Yogyakarta memiliki nilai terendah dari 4 kabupaten lainnya, dimana central pariwisata Yogyakarta berada di wilayah Malioboro hal ini menjadi ketimpangan yang sangat jauh di banding dengan wilayah kabupaten yang lain. Menurut (Widyawati & Muchlisoh, 2020) wilayah dengan presentase penduduk miskin rendah berada di kecamatan Umbulharjo, Gondokusuman, dan Kotagede, Sedangkan menurut pada tahun 2021 rumah tangga miskin multi dimensi terbanyak

pada kemantren kotagede sebanyak 3,8 persen atau 104 rumah tangga miskin multidimensi sedangkan paling sedikit berada di kemantren gondomanan sebanyak 1,2 persen atau hanya 17 rumah tangga miskin multidimensi, oleh karna itu mengambil studi kasus pada kecamatan Kotagede Yogyakarta karena memiliki angka kemiskinan rumah tangga tertinggi di kota Yogyakarta.

Wilayah Kecamatan Kotagede dibagi menjadi 3 Kelurahan, 40 RW dan 165 RT. Keadaan daerah lahan pertanian semakin lama semakin berkurang sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah pemukiman, maupun kegunaan lain yang juga sesuai dengan perkembangan wilayah, meningkatnya perkembangan pemukiman di kotagede dan berkurangnya lahan pertanian mengakibatkan Masyarakat tidak memiliki penghasilan produktif dan akan berdampak pada permasalahan sosial yaitu kemiskinan.

Program ini merupakan pemberian bantuan dana sebagai modal untuk membentuk usaha ekonomi produktif (UEP), program tersebut juga merupakan program unggulan Kementerian Sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Indikator capaian keberhasilan program KUBE adalah terwujudnya kemandirian keluarga fakir miskin penerima bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

Pelaksanaan UEP pemerintah memberti bantuan modal usaha 20 juta per kelompok sesuai dengan jenis usaha yang akan di lakukan,apabila program pertama berjalan akan di berikan modal untuk bulan berikut nya ,apabila program awal tidak berjalan bantuan modal selanjutnya juga tidak akan keluar, hal ini melatif kemandirian dan kekompakan satu kelompok untuk bisa memiliki hidup yang lebih

terarah dan bukan hanya masalah ekonomi saja yang terpecahkan tapi juga masalah sosial dan lingkungan yang terselesaikan apabila program ini berjalan.

Tingginya angka kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pemerintah melakukan beberapa program untuk mengurangi angka kemiskinan dan mendorong perekonomian mikro Masyarakat dalam kemandirian usaha kelompok Masyarakat melalui KUBE. Menurut kementerian sosial Kelompok usaha Bersama merupakan program yang pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan dan sosial melalui kementerian sosial

Pada penelitian ini objek penelitian dilaksanakan di Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, berdasarkan dari fenomena kemiskinan tersebut Kota Yogyakarta merupakan daerah paling rendah angka kemiskinannya dari pada wilayah kabupaten yang lain, Kotagede memiliki tiga kecamatan yang meliputi Umbulharjo, Gondomanan dan Kotagede, dari ketiga kecamatan tersebut Kotagede memiliki angka rumah tangga miskin multi dimensi sebanyak 3,8 persen atau 104 rumah tangga miskin multidimensi.

Munculnya program Kelompok Usaha Bersama dengan harapan kehidupan dan pendapatan ekonomi Masyarakat rentan dapat teratasi dengan adanya program KUBE meliputi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) semua anggotanya diberikan kesempatan untuk melatih berwirausaha serta melatih tanggung jawab terhadap kelompoknya dalam meneruskan usaha KUBE yang dibentuk sebagai wujud UMKM baru bagi masyarakat rentan . Oleh karena itu penelitian ini mengangkat judul “implementasi kebijakan bantuan kelompok usaha Bersama (KUBE) dalam mendukung keberlanjutan peningkatan ekonomi UMKM”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan bantuan kelompok usaha Bersama dalam mendukung keberlanjutan peningkatan ekonomi UMKM?
2. Faktor apa yang mempengaruhi keberlanjutan peningkatan ekonomi UMKM dalam membantu usaha ekonomi produktif bagi program keluarga harapan KUBE?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui regulasi apa yang di keluarkan oleh pemerintah dalam mempengaruhi keberlangsungan KUBE dari PKH dan KPM apakah sudah terlaksana dengan baik atau tidak.
2. Mengetahui faktor penghambat dan pendukung implementasi program KUBE yang ada di kecamatan Kotagede.

Manfaat Penelitian**A. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan atau memperkaya konsep-konsep, teori terhadap kajian ilmu implementasi kebijakan publik dan menjadi sumber wawasan dan pengetahuan untuk para pembaca yang berkaitan dengan implementasi KUBE dan di harapkan menjadi acuan penelitian sejenis

B. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah khususnya bagi Pemkab kota Yogyakarta dan pihak lain yang berwenang dalam pelaksanaan program KUBE pada tahun selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Mengembangkan pengetahuan peneliti tentang Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) perlu adanya dilakukan studi pustaka, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Temuan
1	(Hanum & Suryawati, 2021)	Evaluasi Implementasi Program <i>E-Warong</i> KUBE-PKH di Kabupaten Sukoharjo (Studi Kasus di Kecamatan Mojolaban)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi program <i>E-Warong</i> KUBE PKH di Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dilaksanakan melalui 4 tahapan yakni sosialisasi, Dalam aspek kepatuhannya hampir seluruh pelaksanaan patuh terhadap aturan meskipun masih terdapat beberapa pelaksanaan yang belum optimal
2	(Rahmawati & Kisworo, 2020)	Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendamping memiliki empat peran keterampilan yaitu peran fasilitatif, pendidik, representatif/perwakilan masyarakat, dan teknis. Faktor internal yang menjadi kendala adalah sulitnya peserta untuk mengumpulkan berkas data, dan beradaptasi dengan lingkungan baru pendamping memerlukan waktu lama
3	(Fitria & Fachrurozi, 2023)	Faktor Keberhasilan Program Kelompok Usaha Bersama	menunjukkan bahwa faktor penentu keberhasilan KUBE berupa modal usaha, pengalaman dalam berwirausaha dan peran mentor berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan program KUBE. Kesuksesan KUBE akan memberikan kontribusi yang besar bagi pemerintah dalam mencapai target penurunan angka kemiskinan

No	Peneliti	Judul	Hasil Temuan
4	(Mahino et al., 2018)	Dampak sosial ekonomi melalui program kelompok usaha Bersama (KUBE)dalam meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	KUBE Melati yang ada di Desa Peta Kec. Tabukan Utara, sudah berjalan cukup baik. Hal ini dilihat dari program atau kegiatan yang dilakukan sebagian besar dapat terlaksana. Namun sangat di sayangkan Program Kelompok Usaha Bersama Melati ini sudah tidak lagi berlanjut, Tentunya hal ini perlu di tindak lanjuti mengingat dengan adanya program KUBE Melati ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5	(Afringgo et al., 2021)	Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru	Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa Efektivitas E-Warong KUBE PKH Berkah Harapan di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru adalah cukup baik. Ini terlihat dari aspek ketepatan waktu, tercapainya tujuan program dan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat miskin dari program adalah masih cukup baik
6	(Mudjib Mustain et al., 2022)	Keefektifan Program Keluarga Harapan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Jombang tahun 2021 terindeksi baik dengan bukti adanya gradiasi per tahun pada PKM-PKH 2. Ada peningkatan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang dilihat dari pengeluaran kenaikan rata-rata konsumsi perkapita cenderung searah dengan kenaikan jumlah penduduk. 3. Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kabupaten Jombang dalam tinggi karena

No	Peneliti	Judul	Hasil Temuan
			menurunkan kemiskina 10% pada tahun 2021
7	(Astuti & Aprilianti, 2019)	Menakar Keberlanjutan Program KUBE: Peluang Dan Tantangan Program KUBE Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan di Kelurahan Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta	Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor internal kelompok berpengaruh besar bagi keberlanjutan KUBE. Empat KUBE berkelanjutan memiliki faktor internal yang kuat. Hal ini tercermin dari tingginya komitmen anggota dalam menjalankan peraturan kelompok. Sebaliknya, faktor internal pada kedua KUBE mati lemah karena anggota tidak menjalankan kesepakatan kelompok. Disamping itu, peran pendamping KUBE dari Dinas Sosial kurang optimal dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh kedua KUBE mati
8	(Irwan , Titiek Tjahja Andari, 2020)	Pengaruhorientasi Pasar Terhadap Proses Bisnis Internal Balanced scorecard Pada Usaha Ekonomi Produktif Kelompok Usaha Bersama (Uep – KUBE) Di Bukit tinggi Sumatera Barat, Indonesia	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelola UEP-KUBE sangat memahamibahwa orientasi pasar berpengaruh terhadap proses bisnis internal. Orientasi pasar yang terdiri dari orientasi pelanggan dan orientasi pesaing serta koordinasi antar fungsi, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap proses bisnis internal sedangkan orientasi pelanggan koordinasi antar fungsi mempengaruhi proses bisnis internal secara parsial. Adapun orientasi pesaing tidak signifikan secara parsial memengaruhi proses bisnis internal.
9	(Agus Prianto & M. Sulhan, 2021)	Pengembangan KUBE Sebagai Pengembangan Ekonomi Masyarakat Miskin Penerima Pkh Berbasis Quarduple Helix	Dari hasil penelitian ini terdapat akan ketidak berhasilan dalam progran KUBE Mandiri sebab program yang dijalankan belum berbasis pada kearifan lokal, dan juga perilaku dan sikap KPM PKH

No	Peneliti	Judul	Hasil Temuan
		(Studi Penguatan Ekonomi Masyarakat Miskin Pada Program KUBE–Pkh Di Era New Normal Di Kabupaten Pasuruan)	masih pada impulsif, konsumtif dan ketergantungan pada bantuan subsid PKH. Sehingga tidak ada yang terdorong untuk kemandirian ekonomi KPM PKH.
10	(Yasin, 2020)	Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUBE di desa kuala memiliki potensi, yang terdiri dari Cateringan, Perbengkelan, dan pertukangan meubel. Tetapi yang paling menonjol dan aktif sampai dengan saat ini adalah catering. Ada beberapa masalah yang di hadapi anggota kelompok dalam usaha, seperti: kurangnya modal usaha, masih belum terpenuhinya fasilitas yang di butuhkan serta alat-alat yang harus di sediakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program KUBE masih belum optimal karena adanya faktor penghambat dalam pelaksanaan mulai dari kurang nya anggaran, kurang nya kinerja petugas, kurang jelas nya regulasi dalam mengatur bantuan dan masalah yang bersumber dari internal organisasi KUBE tersebut, adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitian dilakukan pada Kecamatan Kotagede dan penelitian ini lebih mengarah pada regulasi implementasi pemerintah dalam mengatur bantuan sosial demi mendukung keberlanjutan UMKM baru bagi masyarakat miskin, juga pada penelitian ini melihat dari sumber hukum yang mengatur regulai serta melihat sumber hukum yang jelas dalam pelaksanaan program KUBE dan melihat faktor pengambat juga pendukung untuk melihat kinerja dalam mendukung keberlanjutan peningkatan ekonomi KUBE.

Kerangka Teori

1. Implementasi Kebijakan

a. Konsep Dasar dan Definisi Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan upaya dalam mencapai tujuan dari sebuah kebijakan, implementasi kebijakan merupakan penjabaran dari tools atau alat dalam sebuah administrasi dimana organisasi menjadi aktor dalam proses pelaksanaannya dimana aktor tersebut juga sudah memiliki prosedur dan teknik dalam kolaborasinya guna merealisasikan tujuan yang diinginkan (Nur Bakhtiar & Qodir, 2015).

Keputusan kebijakan yang telah direncanakan dan ditetapkan pemerintah juga harus melakukan uji dan juga mengkaji dalam sebuah implementasi kebijakannya terlebih dalam kebijakan tersebut pro rakyat atau negara apakah menjadi kebijakan yang kontradiktif agar dalam putusannya tidak merugikan kepada aktor-aktor yang terkait (Purnama Yahya dkk., 2018).

Menurut Charles Jones mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai *“getting the job done”* and *“doing it”*. Dari rumusan yang sederhana tersebut tidak berarti bahwa implementasi kebijaksanaan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi pelaksanaannya, menurut Jones, menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang atau pelaksana, uang, dan kemampuan operasional, komunikasi implementasi merupakan hal yang paling penting dalam penerapan upaya komunikasi antar organisasi untuk menentukan implikasi ini tujuannya agar tidak adanya miss komunikasi terhadap aktor yang terkait

dan apa yang disampaikan dan diharapkan tepat sasaran. Kedua, adanya sumber daya adalah faktor yang menentukan berjalannya suatu penerapan kebijakan sumber daya yang di maksud disini bisa di artikan seperti sumber daya yang tersedia meliputi aspek manusia (Wulpiah, 2019). Penganggaran dana alat dan kewenangan antar birokrasi organisasi, maka dalam penerapan implementasi kebijakan harus diupayakan sumber daya yang di miliki harus optimal agar tujuan yang dibuat sesuai dengan yang dibutuhkan.

Hal yang menjamin terselenggaranya implementasi dengan mengoptimalkan sumber yang telah tersedia dengan disesuaikan dengan kebutuhan, variable yang menentukan keberhasilan dan kegagalan dalam penerapannya adalah sumber daya manusia atau aparatur maka dari itu kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia harus selalu diperbarui sesuai dengan perubahan jaman yang terus berjalan dalam peningkatan integritas

Sumber daya anggaran memiliki posisi kedua setelah sumber daya manusia dalam mempengaruhi implementasi, minimnya suatu dana atau anggaran yang disediakan menyebabkan keterbatasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu sendiri.

b. Model Implementasi

Keberhasilan implementasi kebijakan banyak ditentukan oleh beberapa faktor, dan faktor tersebut saling terhubung satu sama lain dalam penelitian ini dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang di tawarkan oleh George erward III.

1. George Edward III

Menurut Edward III implementasi dapat di mulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan apakah syarat implementasi kebijakan dapat berhasil, Menurut nya ada empat variable dalam kebijakan publik yaitu:

- a) Tujuan dan Sasaran Kebijakan
- b) Sumberdaya
- c) Sikap
- d) Komunikasi

Keempat factor tersebut harus di laksanakan secara berkelanjutan karena antara satu dengan yang lain nya memiliki hubungan yang terikat dalam merumuskan kebijakan.

1. Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur dari sasaran kebijakan yang ada di level pelaksanaan kebijakan yang bersifat realitas dengan sosio kultur, Bisa di simpulkan implementasi merupakan instrument yang penting bagi pemerintah sebagai implementor dalam mencapai tujuan dan kesepakatan program atau yang telah di rumuskan, Dalam penelitian ini mengambil sumber kebijakan atau tujuan dari UUD 1945 Dan Pancasila juga UUD nomor 13 tahun 2011 dalam mengatur fakir miskin.

2. Sumberdaya

Sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pelaksana dan pemenuhan sumber terkait dalam pelaksanaan program, Artinya sumber

daya bisa menjadi indicator dalam implementasi program atau juga sumberdaya yang di maksud apakah dapat membuat sebuah informasi atau regulasi dalam proses pelaksanaan di lapangan. untuk itu perlunya manajemen SDM yang baik agar meningkatkan kinerja program. Pelaksanaan program dalam penelitian ini menganut implementasi program KUBE yaitu perpres nomor 63 tahun 2017, PMK 254/PMK.05/2015, juga Permensos Nomor 2 tahun 2019.

3. Sikap

Jika implementor setuju dengan bagian isi dari kebijakan maka akan lebih mudah dalam pelaksanaan, ada tiga sikap implementor terhadap kebijakan yaitu kesadaran pelaksanaan, petunjuk atau arahan, dan intensitas dari respon tersebut, maka dalam hal ini penulis akan berfokus pada petunjuk atau arahan dalam proses pelaksanaan

4. Komunikasi

Implementasi akan berjalan secara efektif apabila ukuran dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat mudah di pahami oleh individu atau kelompok yang bertanggung jawab dalam pencapaian tujuan, artinya kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan harus terukur dan terarah dan dapat di komunikasikan secara tepat dengan para pelaksana, yang akan di bagi menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut terdiri dari tahap

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pengembangan, dan tahap kemitraan:

- a. Tahap persiapan melibatkan identifikasi dan analisis masalah yang akan diatasi oleh kebijakan, penelitian tentang solusi yang mungkin, dan pengembangan kerangka kerja untuk implementasi kebijakan. Ini juga dapat mencakup pencarian dukungan dan persetujuan dari pemangku kepentingan dan pembuatan draft kebijakan.
- b. Tahap pelaksanaan dimana kebijakan mulai diterapkan. Tugas penting dalam tahap ini termasuk komunikasi kebijakan kepada semua pihak yang berkepentingan, pelatihan personel yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan, dan pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Selama tahap ini, perlu ada mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan.
- c. Tahap pengembangan terjadi setelah kebijakan telah diterapkan dan melibatkan peninjauan dan evaluasi kebijakan. Berdasarkan umpan balik dan hasil yang diterima selama tahap pelaksanaan, kebijakan mungkin perlu disesuaikan atau ditingkatkan. Tahap ini juga bisa melibatkan penyebaran kebijakan yang telah diperbarui atau ditingkatkan.

Penelitian ini menggunakan teori implementai kebijakan dengan menggunakan model dari goerge Edward III dan van meter van horn karena untuk melaksanakan implementasi kebijakan harus memenuhi unsur- unsur yang mutlak ialah:

a. Unsur Pelaksanaan (Implementor)

Jika suatu sistem berupa kebijakan administrative yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program, pada phase kedua yang harus dilakukan adalah pengorganisasian dengan melalui peng-organisasian, tenaga manusia, alat, tugas, wewenang, tanggung jawab dan tata kerja ditata sedemikian rupa sehingga dapat digerakan untuk melaksanakan kegiatan. agar seluruh kegiatan operasional itu berlangsung dengan daya guna, hasil guna dan produktivitas yang tinggi dan dengan hasil pekerjaan yang memenuhi standar yang telah ditentukan serta terarah kepada pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran organisasional.

b. Program yang akan Dilaksanakan

Proses pengendalian serta pembuatan alokasi sumber daya dengan baik, pada gilirannya dapat dijadikan sebagai suatu format untuk presentasi informasi anggaran. Berdasarkan permasalahan pokok yang berkembang serta prioritas pemecahannya pada setiap unit administratif, program

c. Target Group

Sekelompok orang atau organisasi dalam masyarakat yang akan menerima barang dan jasa atau yang akan dipengaruhi perilakunya oleh kebijakan yang diimplementasikan bergantung kepada kesesuaian isi kebijakan

(program) dengan harapan mereka. Selanjutnya karakteristik yang dimiliki oleh mereka (kelompok sasaran).

1. Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

a. Pengertian KUBE

Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya disebut KUBE adalah kelompok keluarga miskin yang dibentuk, tumbuh dan berkembang atas prakarsanya dalam melaksanakan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan keluarga dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan di harapkan dapat memecahkan permasalahan soial yang di alami, dengan kata lain KUBE merupakan suatu himpunan kelompok Masyarakat yang ingin memingkatkan kualitas hidup anggota nya dengan membentuk wadah kegiatan kelompok untuk tumbuh dan berkembang.

KUBE bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin, mengembangkan pelayanan sosial dasar, meningkatkan pendapatan, kapasitas individu, dan kemampuan berusaha anggota kelompoknya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri serta meningkatkan kesetiakawanan sosial.dan sasaran dari program ini yakni masyarakat rentan masih sulit dalam memenuhi kebutuhan keseharian atau masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan produktif.

b. Pembentukan KUBE

1) Kriteria KUBE

Terdapat beberapa aturan dalam pembentukan kelompok usaha

Bersama yakni:

- a) Mempunyai potensi, Kemauan, dan kemampuan
- b) Mempunyai jenis usaha yang akan di lakukan dan tinggal di wilayah yang sama
- c) Keterbatasan akses terhadap pasar, modal,dan usaha.
- d) Jumlah anggota KUBE paling sedikit lima kepala keluarga dan paling banyak lima belas kepala keluarga
- e) KUBE memiliki struktur organisasi terdiri atas ketua, sekertaris, bendahara dan anggota
- f) Kepengurusan KUBE dipilih berdasarkan hasil musyawarag atau keputusan anggota kelompok

Penangan fakir miskin merupakan program dari pemerintah yang berkelanjutan guna memfasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, Setiap kelompok penerima manfaat di berikan bantuan modal sebanyak 20 juta untuk digunakan sebagai UEP usaha ekonomi produktif agar dapat meningkatkan penghasilan dan meciptakan kemitraan usaha yang menguntungkan bagi seluruh anggota,Pemeberian UEP kepada KUBE bertujuan untuk mengatasi permasalahan fakir miskin dalam meningkatkan pendapatan dan kemampuan berusaha.

Definisi Konseptional

Kegiatan individu atau kelompok suatu lembaga pemerintah yang dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan kebijakan disebut implementasi kebijakan. Pada tingkat perkembangan rumusan kebijakan dan kegiatan yang lebih spesifik (mikro), implementasi kebijakan biasanya bersifat turunan. Dengan kata lain, ini adalah pelaksanaan keputusan atau kebijakan yang menangani masalah manajerial dan teknologi. Ketika target telah ditetapkan, tujuan dan sasaran telah ditetapkan, rencana kegiatan telah dibuat, dan dana tersedia untuk distribusi, tahap implementasi dapat dimulai.

Menurut (Wahab, 2022) bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahwa kebijakan yang bagus secara konseptional dan dirumuskan melalui cara-cara yang demokratis dan melibatkan semua stakeholders hanya akan di atas kertas jika tidak diimplementasikan dengan baik dan dilakukan melalui proses yang benar.

Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah definisi yang didasarkan atas sifat-sifat hal yang didefinisikan dapat diamati. Secara tidak langsung definisi operasional itu akan menunjuk alat pengambil data yang cocok digunakan atau mengacu pada bagaimana mengukur suatu variabel. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variable penelitian yang di kemukakan oleh Geogre edwards III dan Van Meter Van Horn.

Tabel 1. 3 Definisi Operasional

No	Variable	Indikator	Parameter
1.	Implementasi Kebijakan	Tujuan dan sasaran	1) Kejelasan tujuan kebijakan
		Sumber Daya	1) Manajemen SDM 2) Insentif bantuan dana
		Disposisi / Sikap	1) Sikap implementor 2) Tupoksi
		Komunikasi	1) Tahap persiapan 2) Tahap pelaksanaan 3) Tahap pengembangan 4) Tahap Kemitraan

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang tidak menggunakan perhitungan. Jenis penelitian adalah studi kasus dimana hasil dari penelitian bersifat analisis-deskriptif, yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku yang diamati terkait implementasi program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam rangka Evaluasi Implementasi Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Dalam Mendukung Keberlanjutan Peningkatan Ekonomi UMKM pada kecamatan Kotagede.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kecamatan kotagede Dengan tujuan untuk menjelaskan secara komprehensif terkait implementasi Program

Kelompok Usaha Bersama dalam mendukung keberlanjutan peningkatan ekonomi UMKM secara menyeluruh.

C. Jenis data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data dalam proses pengambilan data juga observasi untuk mendapatkan hasil sesuai yang di harapkan.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di dapatkan dari hasil proses wawancara langsung pada pihak terkait yang akan di jadikan objek untuk pengambilan mendapatkan informasi, object wawancara dalam penelitian ini antara lain.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari hasil penelitian terdahulu atau berupa kebijakan pemerintah, jurnal, artikel, dan surat kabar digital dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah Teknik pengumpulan data sebagai Langkah strategis dalam melakukan penelitian tujuan utama agar mendapatkan data untuk memenuhi standar yang sudah ditetapkan dalam menjawab rumusan permasalahan yang dibahas di dalam penelitian, Teknik pengumpulan data ini mejadi Langkah penting dalam melakukan penelitian agar peneliti bisa mendapatkan data yang sesuai dengan yang diharapkan dan sesuai dengan permasalahan dilapangan.

Teknik pengumpulan data terdapat beberapa metode yang dapat digunakan secara individu namun dapat pula menggabungkan beberapa metode, Beberapa metode penelitian data diantara lain:

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara atau sesi tanya jawab secara langsung pada narasumber, hasil yang diperoleh membentuk poin penting penelitian agar dapat digunakan sebagai jawaban dalam permasalahan.

Metode wawancara dibedakan menjadi wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, Dalam wawancara terstruktur peneliti harus mengetahui pasti informasi apa yang akan di gali pada narasumber dengan membuat daftar pertanyaan yang sistematis, Dalam wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas dengan tidak membuat pertanyaan yang spesifik.

Tabel 1. 4 Sumber Informasi

No	Informan	Tugas Dan Fungsi	Keterangan
1	Kepala Dinas Sosial, kota Yogyakarta	Kewenangan Menyusun rencana/program, merumuskan kebijakan, dan mengevaluasi hasil.	Kewenangan sebagai pelaksana program atau kebijakan yang telah direncanakan.
2	Pendamping KUBE	Berfungsi sebagai fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, peran teknis, dan sebagai peran pendamping.	Memiliki peran penting Yang mempengaruhi kesuksesan KUBE.
3	Anggota kelompok usaha Bersama	Menjalankan KUBE sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.	Merupakan sasaran dari program KUBE, dan secara langsung merasakan dampak dari program tersebut.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak merujuk pada subjek peneliti melainkan mengumpulkan beberapa informasi seperti buku, berita digital, jurnal, atau kebijakan pemerintah yang dianggap relevan dengan subjek penelitian. Oleh karena itu penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data dengan metode studi dokumentasi agar mengumpulkan data yang relevan untuk memperkuat data dalam hasil penelitian.

c. Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data, masih ada proses yang dilakukan yang dilakukan sistematis dan terarah agar data yang telah dikumpulkan bisa dibuktikan kebenarannya, karena proses analisis data harus bisa membuktikan hipotesis dari data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti.

E. Analisis Data

Analisis data penelitian ini dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti jurnal, kebijakan pemerintah, wawancara dan fenomena yang relevan pada subjek penelitian seperti kemiskinan serta Upaya KUBE dalam ekonomi berkelanjutan, Kemudian akan melakukan pemfilteran data tersebut sesuai dengan indikator yang digunakan

F. Penyajian Data

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisaikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur. Penyajian data dalam bentuk tersebut

mempermudah peneliti dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga informasi yang didapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu untuk menjawab masalah penelitian.

G. Penarikan Kesimpulan

Fase ini merupakan puncak dari semua data yang dikumpulkan selama penelitian. Mencari atau memahami signifikansi, keteraturan, pola, penjelasan, aliran konsekuensi, atau proposisi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menarik kesimpulan atau memverifikasinya. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang diberikan secara naratif dapat diambil setelah dilakukan verifikasi terakhir dalam pengolahan data.